



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Rabu, 6 Juni 2012
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara : Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2013;
Ketua Rapat : Dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota : orang dari 51 Anggota Komisi IX DPR RI, orang izin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dibuka pukul 10.35 WIB, setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

alokasi anggaran sehingga tepat sasaran dan efektif, sekaligus menyongsong pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015 dan BPJS Kesehatan Tahun 2014. Seperti sarana kesehatan dasar di daerah pemukiman transmigrasi melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI.

3. Dalam meningkatkan sistem ketenagakerjaan yang profesional, komprehensif, dan memiliki keberpihakan kepada angkatan kerja maupun tenaga kerja, maka Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI harus memiliki skala prioritas program, antara lain :
 - menyelesaikan masalah hubungan industrial yang melibatkan serikat pekerja-serikat pekerja;
 - meningkatkan program pengawasan, serta jumlah dan kualitas tenaga pengawas;
 - melakukan pelatihan kewirausahaan yang memiliki kejelasan orientasi yang berkelanjutan sebagai wirausaha formal maupun informal;
 - melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing melalui Komite Pengawasan Nasional berdasarkan Permen No.10 Tahun 2012; dan
 - melakukan perluasan kesempatan kerja di dalam negeri;
 - Pemberdayaan melalui BLK-BLK.

4. Komisi IX DPR-RI meminta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk :
 - a. Memberikan laporan tertulis mengenai penyerapan anggaran Program Tahun 2011;
 - b. Data hasil Penelitian dan Pengembangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI selama Tahun 2010-2012;
 - c. Data keberhasilan program transmigrasi; dan
 - d. Acuan tertulis yang digunakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dalam menentukan masalah ketenagakerjaan terutama yang terkait dengan garis kemiskinan, angkatan kerja dan tenaga kerja, dan pengangguran.Semua data di atas harus diserahkan pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Rapat diakhiri pukul 15.45 WIB

Jakarta, 6 Juni 2012

**MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI,**



**PIMPINAN KOMISI IX DPRRI
KETUA,**

